

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNA
AKUN FIKTIF OLEH *DRIVER GRABCAR*
(Studi Kasus Pada *Driver GrabCar* Bandar Lampung)**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:
M. MIFTAKHUR ROZAQ
NPM: 1421030330
Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)**



**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNA
AKUN FIKTIF OLEH *DRIVER GRABCAR*
(Studi Kasus Pada *Driver GrabCar* Bandar Lampung)**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:
M. MIFTAKHUR ROZAQ
NPM: 1421030330
Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)**

Pembimbing I ; Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.
Pembimbing II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Teknologi saat ini tidak dapat dipungkiri berkembang dengan sangat pesat. Masyarakat berlomba-lomba berinovasi dan memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk menciptakan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Salah satu bentuk perkembangan teknologi yang begitu pesat yang saat ini sedang dibicarakan dan dimanfaatkan secara masif adalah hadirnya transportasi berbasis online. Di Indonesia sendiri terdapat sejumlah perusahaan transportasi berbasis online, salah satunya yaitu Grab yang di dalamnya terdapat pembagian insentif jika *driver* tersebut bisa memenuhi syarat dan ketentuan bagi perusahaan. Sedangkan untuk mendapatkan insentif tersebut *driver* harus mencapai jumlah minimum dan maximum dalam orderan tersebut untuk memperoleh insentif dengan berbagai macam cara yang salah satunya dilakukan oleh para oknum *driver GrabCar* yaitu menggunakan akun fiktif. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana kedudukan akun fiktif *driver GrabCar* Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan akun fiktif *driver GrabCar* Bandar Lampung. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*), dan sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analitis*. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pengelolaan data yaitu, *editing, coding* dan sistematika data, kemudian data dianalisis dengan analisis *kualitatif* dengan pendekatan berfikir secara *deduktif*. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, *pertama*, kedudukan akun fiktif *driver GrabCar* Bandar Lampung jika dilihat dari prakteknya yaitu dengan meminjam atau bahkan membeli akun *GrabCar* milik orang lain maka bertentangan dengan kode etik pengemudi Grab tentang larangan menggunakan akun pengemudi *GrabCar* lainnya dengan atau tanpa smartphone, menggunakan SIM orang lain, atau bahkan menggunakan mobil pengemudi lainnya tanpa pemberitahuan atau lapor kepada pihak *GrabCar* yang termasuk jenis pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan dapat dikenakan sanksi yaitu di dikeluarkan dari *GrabCar*. *Kedua*, penggunaan akun fiktif yang dilakukan oleh *driver GrabCar* jelas bertentangan dengan syariat Islam, hal ini disebabkan karena *driver GrabCar* mengambil keuntungan dengan cara yang tidak sesuai yaitu berbuat curang untuk mendapatkan keuntungan lebih yang dapat merugikan perusahaan. Dari cara tersebut *driver GrabCar* mendapatkan keuntungan lebih dari harta hasil perserikatan. Maka dengan demikian akad kerjasama antara PT Grab dengan *driver* terdapat unsur penipuan, sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (rusak), dan *driver* tidak berhak menerima sebuah insentif dari pihak Grab, sementara hukum penggunaan akun fiktif yaitu tidak diperbolehkan (haram).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengguna Akun Fiktif
Oleh Driver GrabCar (Studi Kasus Pada Driver GrabCar
Bandar Lampung)**

Nama : M. Miftakhur Rozaq

NPM : 1421030330

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.
NIP. 195802011986031002

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.
NIP. 197111061998032005

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.Si
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengguna Akun Fiktif Oleh Driver GrabCar (Studi Kasus Pada Driver GrabCar Bandar Lampung), disusun oleh

M. Miftakhur Rozaq NPM: 1421030330, Jurusan: Muamalah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Rabu, 07 Oktober

2020.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Juhrotul Khulwah, M.S.I.

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud, M.Ag.

Penguji I : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H, M.H.

Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Penguji III : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP.196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
(Q.S. an-Nisa: 29).¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2002), h.237.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah swt yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Wartam dan Ibundaku Umi Solekhah, atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih dan sayang, dan selalu memberikan support, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

M. Miftakhur Rozaq dilahirkan di Sukarame Kota Bandar Lampung pada tanggal 09 Oktober 1995, anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Wartam dan Ibu Umi Solekhah.

Pendidikan penulis di mulai dari tingkat TK Dharma Wanita Perumnas Way Halim lulu pada tahun 2000, melanjutkan ke SDN 2 Harapan Jaya Kecamatan Korpri Raya lulus pada tahun 2006, melanjutkan ke MTS N 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan ke SMA Gajah Mada Bandar Lampung lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Muamalah sampai sekarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengguna Akun Fiktif Oleh *Driver GrabCar* (Studi Kasus Pada *Driver GrabCar* Bandar Lampung)”

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah,
3. Bapak Khoiruddin, M.Si. selaku ketua Program Studi Muamalah dan ibu Juhrotul Khulwah, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Muamalah.
4. Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. selaku pembimbing I, dan ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Angkatan 2014
8. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terima kasih penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 15 Juli 2020

M. Miftakhur Rozaq
NPM. 1421030330

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	4
E. Rumusan Masalah	5
F. Tujuan Penelitian	5
G. Signifikansi Penelitian	5
H. Metode Penelitian	5

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad/Perjanjian	10
1. Pengertian Akad	10
2. Dasar Hukum	11
3. Rukun dan Syarat akad	12
4. Macam-macam Akad	17
5. Akibat Penggunaan Akun Fiktif Terhadap Akad	18
6. Berakhirnya Akad	20
7. Azas-azas Akad dalam Hukum Islam	20
B. <i>Ujrah/Upah</i>	28
1. Pengertian <i>Ujrah/Upah</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Ujrah/Upah</i>	29
3. Rukun dan Syarat <i>Ujrah/Upah</i>	34
4. Macam-macam dan Waktu Pembayaran <i>Ujrah/Upah</i>	39
5. <i>Ujrah/Upah</i> Yang Dilarang Dalam Islam	42
6. Hak Menerima <i>Ujrah/Upah</i>	45
7. Sistem Pembayaran <i>Ujrah/Upah</i> Dalam Islam	46
C. Tinjauan Pustaka	49

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kantor Grab Sukabumi Kota Bandar Lampung	52
--	----

1. Sejarah dan Perkembangan Grab	52
2. Visi, Misi, dan Tujuan Usaha	55
3. Syarat Pendaftaran Sebagai <i>Driver Grab</i>	57
4. Layanan Grab	57
5. Hak dan Kewajiban Perusahaan dan <i>Driver Grab</i>	58
6. Sistem Oprasional akun <i>GrabCar</i> Oleh <i>Driver</i>	65
7. Kerugian Penggunaan Akun Fiktif Bagi Perusahaan	70
B. Insentif Pengguna Akun Resmi	71
C. Penggunaan Akun Fiktif Oleh <i>Driver GrabCar</i> Bandar Lampung	72
 BAB IV ANALISA DATA	
A. Kedudukan Akun Fiktif <i>Driver GrabCar</i> Bandar Lampung	80
B. Tinjauan Hukum Islam Atas Kedudukan Akun Fiktif <i>Driver GrabCar</i> Bandar Lampung	83
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Rekomendasi	88
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pemahaman yang dimaksud dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca, maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengguna Akun Fiktif Oleh Driver GrabCar (Studi Kasus Pada Driver GrabCar Bandar Lampung).**

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

Tinjauan adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹

Hukum Islam dalam *fiqh* adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini untuk semua permasalahan bagi umat Islam. Lebih lanjut, T. M Hasbi Ashshiddiqi menjelaskan bahwa hukum Islam adalah koleksi para ahli hukum (*fuqoha*) untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.²

Pengguna Akun fiktif adalah seseorang yang mengoperasikan sebuah aplikasi yang bukan milik sendiri melainkan milik orang lain, yang diperoleh dengan cara meminjam atau membeli dari orang lain.³

¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2001), h. 132.

² Hasby Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), h. 44.

³ Wikipedia, "Pengertian Akun Fiktif", (On-Line) tersedia di: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengertian_Akun_Fiktif. (10 Mei 2020).

Driver GrabCar adalah orang yang menjalankan kegiatan (layanan) perusahaan sebagai mitra, melalui aplikasi yang disediakan oleh perusahaan Grab.⁴

Berdasarkan istilah-istilah pada penegasan judul di atas, yang dimaksud dengan judul ini adalah suatu kajian tentang *driver GrabCar* yang menggunakan akun fiktif di Kota Bandar Lampung dilihat dari hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan dalam memilih judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Objektif

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan yang lagi marak saat ini yaitu ojek online yang salah satunya adalah *GrabCar* yang menerapkan sistem bagi hasil antara *driver* dengan perusahaan Grab. Dengan pembagian sistem bagi hasilnya 80%-20%, tetapi modal yang diberikan perusahaan kepada *driver* berupa aplikasi semata dan saldo kredit yang terdapat pada aplikasi dan terdapat pembagian insentif jika *driver* tersebut bisa memenuhi syarat dan ketentuan bagi perusahaan. sedangkan untuk mendapatkan insentif tersebut *driver* harus mencapai jumlah minimum dan maximum dalam orderan tersebut untuk memperoleh insentif dengan berbagai macam cara yang salah satunya adalah akun fiktif.

⁴ Wikipedia, "Grab (aplikasi)", (On-Line) tersedia di: [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab_\(aplikasi\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab_(aplikasi)). (10 Mei 2020).

2. Secara Subyektif

- a. Pembahasan ini cukup relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah).
- b. Tersedianya data atau bahan-bahan yang mendukung sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikannya.

C. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt, di muka bumi ini tidak dapat melepaskan diri dari berbagai macam kebutuhan, dan dalam memenuhi kebutuhannya tersebut manusia membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain, karena tidak seorang pun manusia mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga manusia membutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Aktifitas bisnis diperlukan oleh setiap manusia karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu harus adanya suatu timbal balik atas pekerjaan yang telah dilakukan seseorang kepada orang lain sebagai upah atas apa yang ia kerjakan. Dalam membentuk usaha yang riil tidak akan lepas dari sistem kerjasama atau kemitraan dan dalam kemitraan akan terjadi perjanjian dua pihak atau lebih. Akad muamalah merupakan akad mitra-janji bukan antara dua orang saling berlawanan. Tidak dibenarkan dalam hubungan muamalah terjadi keterpaksaan dalam bentuk apapun termasuk ketidakberdayaan secara ekonomi dari salah

satu pihak. Tidak dibenarkan pula terjadinya penindasan secara ekonomi salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Perusahaan Grab adalah salah satu bentuk usaha mandiri kreatif dimana dalam pemberian upah kepada *driver Grab* menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh *driver Grab*. Perjanjian bagi hasil antara perusahaan Grab dengan para driver dimulai ketika *driver* memndaftarkan diri sebagai mitra Grab dan menjalankan layanan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan Grab. Dengan demikian perusahaan Grab dan driver harus saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini bisa berjalan tentu tidak akan terlepas dari suatu akad atau kontrak kerja antara perusahaan Grab dengan *driver Grab* yang telah disepakati bersama.

Hal inilah yang menjadi permasalahan dan menarik untuk diteliti yaitu tentang sistem bagi hasil antara perusahaan dengan *driver Grab*. Maka judul skripsi ini adalah: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengguna Akun Fiktif Oleh *Driver GrabCar* (Stadi Kasus Pada *Driver GrabCar* Bandar Lampung)”.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan di teliti adalah kajian tentang kedudukan akun fiktif *Driver GrabCar* Bandar Lampung serta ditinjau dari hukum Islam, sehingga tidak akan terjadi pembahasan yang terlalu lebar dan meluas.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Akun Fiktif *Driver GrabCar* Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Akun Fiktif *Driver GrabCar* Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kedudukan Akun Fiktif *Driver GrabCar* Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Akun Fiktif *Driver GrabCar* Bandar Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan para pembaca khususnya bermanfaat bagi para *driver GrabCar* di Kota Bandar Lampung dalam melakukan pekerjaannya, dan umumnya bagi para *driver* ojek online di seluruh Provinsi Lampung, serta diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran yang positif dan memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan, agar tetap hidup dan berkembang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat dengan masyarakat.⁵ Jadi penulis mengadakan penelitian

⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2006), h. 3

mengenai beberapa masalah aktual yang ada di tengah masyarakat dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Adapun objek penelitian lapangan tersebut adalah di Kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.⁶ Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinprestasikan, dan kemudian di simpulkan.⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yaitu dari para *Driver GrabCar* di Kota Bandar Lampung.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada di luar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan.

⁶ *Ibid.* h. 7.

⁷ *Ibid.* h. 105.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.⁸ Dalam penelitian ini jumlah keseluruhan populasinya adalah 247 *Driver GrabCar*, dengan 237 *Driver GrabCar* pemilik akun asli dan 10 *Driver GrabCar* yang menggunakan akun fiktif.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan menentukan sendiri sampel yang diambil karena pertimbangan tertentu.⁹ Oleh karenanya, peneliti harus benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian, kriteria yang pantas untuk dijadikan sampel pada

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung, Alfabeta, 2011), h. 80.

⁹ *Ibid.* h. 81.

penelitian ini adalah 10 orang yaitu 8 para *Driver GrabCar* di Kota Bandar Lampung dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun dan pernah melakukan/menggunakan akun fiktif dan 2 orang karyawan Grab.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

a. Metode Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.¹⁰ Observasi dilakukan di Kota Bandar Lampung.

b. Metode Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah tehnik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dicatat atau direkam.¹¹ Yaitu penulis melakukan wawancara terhadap para *Driver GrabCar* yang menggunakan akun asli dan akun fiktif di Kota Bandar Lampung.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.¹²

¹⁰ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M, 2015), h. 105.

¹¹ *Ibid*, h. 97.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suratan Pendekatan* (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), h. 231.

5. Metode Pengelolaan Data

Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna dengan cara yaitu:

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen interview, apakah sudah lengkap, relevan jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu member catatan data yang dinyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-qur'an dan hadits, atau buku-buku literature lainnya yang relavan dengan penelitian
- c. *Sistematisasi data*, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.¹³

6. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan pendekatan berfikir secara *deduktif* adalah cara berfikir yang berpangkalan kaidah-kaidah yang bersifat umum yang kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat khusus.¹⁴

¹³ *Ibid.* h. 26.

¹⁴ *Ibid.* h. 32

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab (العقد) yang artinya perikatan, dan permufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.¹ Secara etimologi (bahasa) akad mempunyai beberapa arti, antara lain: ²

- a. Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersabung dikemudian menjadi potongan benda.
- b. Sambungan (*Aqdatun*), yaitu sambungan yang menjadi memegannng kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*al-ahdu*), sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Ali Imran ayat 76 yaitu sebagai berikut:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS. Ali Imran (3): 76).³

¹ Nasrun Harun *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2007), h. 97.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2009), h. 340.

Istilah ‘*aqdu* dalam al-Qur’an mengacu kepada pertanyaan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut. Perkataan ‘*aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama maka terjadilah perikatan dua buah janji (‘*aqdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebutkan perikatan (‘*aqad*).⁴

Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan qabul pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuan untuk mengikat diri. Jadi setiap pernyataan diungkapkan oleh pihak lain setelah ijab disebut *qabil* (Pelaku qabul), tanpa membedakan antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama itu.⁵

2. Dasar Hukum Akad

a. Surat al-Maidah ayat 1, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلَتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْآنْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan

⁴ Tim Tasbih Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: Versia Yogya Grafika, 2001), h. 23.

⁵ Nasrun Harun *Fiqh Muamalah*, h. 98.

dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah (5): 1).⁶

b. Surat Ali Imran ayat 76, yaitu sebagai berikut:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.⁷

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun akad adalah kata mufrad dari kata jama' "araka" artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sah (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam pekerjaan itu.⁸ Dengan demikian yang dimaksud dengan rukun adalah suatu unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan yang lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan jual beli, upah mengupah atau perdagangan.

Adapun Ulama Hanafiyah mengartikan rukun dengan sesuatu yang tergantung atasnya sesuatu yang lain dan ia berada dalam esensi sesuatu tersebut, sedangkan menurut Jumhur Ulama Fiqh, rukun adalah sesuatu yang lain atasnya, tetapi tidak harus berada pada esensi sesuatu tersebut.⁹

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 275.

⁷ *Ibid.* h. 340.

⁸ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h.300.

⁹ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing House, 2003), h. 264.

Setelah mengetahui bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun akad adalah sebagai berikut:¹⁰

1) *Aqid*, ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki *haq* (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki *haq*. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid*, antara lain:

a) *Ahliyah*, keduanya memiliki kecakapan untuk melakukan transaksi.

Biasanya seseorang akan memiliki *ahliyah* jika telah baliq dan berakal, yang berarti tidak gila mampu membedakan yang baik dan yang buruk.

b) *Wilayah*, yaitu hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan kewenangan untuk mentransaksikannya.

2) *Ma'qud alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.

3) *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.

Beda akad, maka berbedalah maksud dan tujuan pokok akad.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 46.

4) *Sighat al 'aqd* ialah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Shighat* tersebut biasa disebut *ijab qabul*.

a) Akad dengan Lafazh (Ucapan)

Akad dengan ucapan adalah akad yang paling sering digunakan sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua belah pihak harus saling mengerti satu sama lain ucapan masing-masing serta menunjuk keridhaanya.

b) Akad dengan perbuatan

Akad ini terjadi tanpa menggunakan ucapan, sebab terkadang dalam akad tidak digunakan ucapan tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang.

c) Akad dengan Isyarat

Akad dengan isyarat digunakan bagi orang-orang yang tidak mampu berbicara, sebaliknya bagi orang yang mampu berbicara tidak dibenarkan dengan akad ini melainkan harus dengan menggunakan akad lisan atau tulisan

d) Akad dengan Tulisan

Akad dengan tulisan diperbolehkan digunakan bagi orang yang mampu berbicara maupun yang tidak mampu berbicara dengan

syarat tulisan itu harus jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak.¹¹

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Sighat al 'aqd* ialah:

- a) *Sighat al 'aqd* harus jelas pengertiannya, hal yang termasuk dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian
- b) Harus sesuai antara ijab dan qabul tidak boleh antara yang berijab dengan yang menerima berbeda lafadz.
- c) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakuti oleh orang lain.

b. Syarat Akad

Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas, ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan (*luzum*), yaitu sebagai berikut:¹²

1) Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian:

- a) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b) Khusus, yakni syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak diisyaratkan pada bagian lainnya.

¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 46

¹² *Ibid.* h. 64-65.

2) Syarat Sahnya Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam akad, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).

3) Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara', adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*thasaruf* sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini diisyaratkan antara lain:

- a. Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- b) Barang yang dijadikan tidak berkaita dengan kepemilikan orang lain.

4) Syarat Kepastian Hukum (*Luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantaranya syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa *khiyar* jual beli, seperti *khiyar* syarat, *khiyar* aib, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.¹³

4. Macam-macam Akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Di antara bagian akad yang terpenting adalah berikut ini:¹⁴

a. Berdasarkan ketentuan syara'

1) Akad *Sahih*

Akad *sahih* adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan syara'. Dalam istilah ulama Hanafiyah akad *sahih* adalah akad yang memenuhi ketentuan syariat pada asalnya dan sifatnya.

2) Akad tidak *Sahih*

Akad tidak *sahih* adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad yang batil atau fasid termasuk golongan ini, sedangkan ulama hanafiyah membedakan antara fasid dan batal.

¹³ *Ibid.* h. 65-66.

¹⁴ *Ibid.* h. 66.

b. Sifat-sifat Akad

Segala bentuk *tasharuf* (aktivitas hukum) termasuk akad memiliki dua keadaan umum.

1) Akad Tanpa Syarat (Akad *Munjiz*)

Akad *munjiz* adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa memberi batasan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat. Akad seperti ini dihargai syara' sehingga menimbulkan dampak hukum.

2) Akad Bersyarat (Akad *ghair Munjiz*)

Akad *ghair munjiz* adalah akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya .

5. Akibat Penggunaan Akun Fiktif Terhadap Akad

Akad yang cacat dalam perspektif hukum perjanjian Islam merupakan persoalan akad antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Dalam melakukan suatu akad, terkadang akad tersebut diliputi beberapa cacat yang dapat menghilangkan kerelaan, atau menjadikan akad tersebut berdiri diatas pondasi moral yang tidak benar, maka pada saat itu pihak yang dirugikan memiliki hak untuk memfasakh (membatalkan/menggugurkan) akad, atau bahkan dapat menjadikan akad tersebut tidak sah.

Cacat pada akad (kontrak) dalam *fiqh* Islam adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah: Tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad terjadinya paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan, dan tipu muslihat. Misalnya terjadi *ikrah* (paksaan) yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan atau ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan.

Tindakan pelanggaran terhadap kerja sama yang dilakukan oleh *driver GrabCar* dengan tujuan untuk mengelabui atau menipu perusahaan demi mendapatkan keuntungan dinilai bertentangan dengan konsep kerjasama. Dalam menjalankan bisnis dengan menggunakan pola perkongsian tindakan penipuan atau kecurangan harus dihindari karena dapat merusak legalitas perserikatan. Praktik penipuan yang dilakukan *driver GrabCar* seperti halnya menggunakan akun fiktif, tindakan tersebut semata-mata bertujuan untuk mendapatkan bonus dari perusahaan karena pihak perusahaan telah menjanjikan akan memberikan reward kepada *driver* yang paling banyak membawa penumpang dalam sehari, oleh karena itu akun fiktif tersebut merupakan suatu tindakan penipuan. Tindakan yang dilakukan oleh *driver* tersebut jelas bertentangan dengan syari'at Islam, karena terdapat unsur penipuan, sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (rusak), dan pihak *driver* tidak berhak menerima sebuah insentif dari pihak Grab.

6. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila:

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang sifatnya mengikat, suatu akad dianggap berakhir apabila: (a) akad itu terdapat unsur tipuan atau salah satu unsur tidak terpenuhi; (b) berlakunya *khiyar* syarat, *khiyat* aib, atau *khiyar* rukyah; (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa.¹⁵

7. Asas-Asas Akad dalam Hukum Islam

Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh pada pelaksanaan akad oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan akad, maka akan

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 35

berakibat batal atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat.¹⁶ Asas-asas tersebut diantaranya adalah:

a. Asas *Ibahah* (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas *Ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah. Asas ini dirumuskan dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.¹⁷

Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.¹⁸

b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objeknya maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling mendzalimi antara sesama manusia melalui perjanjian yang dibuatnya. Asas ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua

¹⁶ *Ibid.* h. 75.

¹⁷ H. A. Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 138.

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, h. 79.

bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan, dari pihak manapun. Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas terhadap asas *ibahah* dalam muamalah.¹⁹

c. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha' iyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.²⁰

Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-dalil hukum berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa (4): 29).²¹

d. Asas Kerelaan (*al-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua akad yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan pada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Hukum Islam mempunyai pandangan yang berbeda dengan hukum perdata umum dalam hal kerelaan membuat kontrak. Dalam hukum perdata umum, kontrak dianggap sah apabila dibuat atas dasar sukarela, meskipun tidak memperhatikan nilai-nilai agama. Adapun dalam hukum

¹⁹ *Ibid.* h. 81.

²⁰ *Ibid.* h. 83.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 189.

Islam nilai-nilai agama sangat diperhatikan. Oleh karena itu, kemerdekaan seseorang membuat kontrak tidak boleh menyimpang dari ketentuan agama Islam, meskipun orang yang membuat kontrak itu telah menyatakan kerelaannya. Dengan kata lain, hukum Islam pada dasarnya memberi kebebasan orang yang membuat kontrak sesuai dengan keinginannya, tapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya.²²

e. Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat persentase tertentu sekalipun saat dananya mengalami kembalian negatif.²³

f. Asas Persamaan dan Kesetaraan (*al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, h. 87.

²³ *Ibid.* h. 90.

pihak yang melakukan akad perjanjian karena erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam akad yang dibuatnya.²⁴

g. Asas Keadilan (*al- 'Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling mendzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.²⁵ Allah berfirman dalam surat Hud ayat 84 yang berbunyi:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنفُسُوا أَلْمِغِيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرٰكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ٨٤

Artinya: Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat). (QS. Hud (11): 84).²⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap kontrak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan maka prinsip keadilan sangat menentukan berlangsungnya kontrak tersebut, sebab keadilan itu merupakan hal yang bersifat multidimensional yang berintikan kebenaran.

h. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

²⁴ A Mas'adi Ghufuran, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 77.

²⁵ *Ibid.* h. 80.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., h. 498

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musyaaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.²⁷

i. Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.²⁸

j. Asas Tertulis (*al-Kitabah*)

Asas lain dalam melakukan akad adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

²⁷ A. Mas'adi Ghufuran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 79.

²⁸ *Ibid.* h, 80.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah;

Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Baqarah (2): 282).²⁹

k. Asas Ilahiah

Asas ilahiah diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah swt sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 4 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا
يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ

Artinya: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Hadid (57): 4).³⁰

B. Ujrah/Upah

1. Pengertian Ujrah/Upah

Menurut bahasa (etimologi) upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.³¹

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 210.

³⁰ *Ibid.* h. 487.

³¹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Badar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 141.

Sedangkan upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah* dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti 'iwad (ganti) kata "*al-ujrah*" atau "*al-ajru*" yang bahasa berarti *al-iwad* (ganti). Dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti perbuatan.³²

Menurut arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual 'ain dari benda itu sendiri. Sedangkan menurut ulama hanafiah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran jumlah yang disepakati.³³

Pengertian upah dalam kamus bahasa indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.³⁴ Upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah merupakan harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.³⁵

2. Dasar Hukum *Ujrah*/Upah

Dalam akad ini, beberapa fuqaha sepakat bahwa *ujrah* dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadis (as-Sunnah), dan ijma'. Begitupun beberapa ulama, seperti Abu Bakar, al-Qasyani, Ibnu Kaisan, Ismail bin Ulayyah, An-

³² Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 29.

³³ *Ibid.* h. 29.

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h. 1108.

³⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005), h. 361.

Nahrawani, dan Hasan al-Basri. Mereka tidak membenarkan *ujrah*, sebab *ujrah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.³⁶

Di samping itu, *ujrah* haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan syara' dan harus diketahui jumlahnya. *Ujrah* yang disyari'atkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah. Imbalan yang pantas menurut syara' adalah sesuatu yang bernilai dan terdapat dan terdapat keridaan antara kedua belah pihak.³⁷

a. Al-Qur'an

Allah swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 233 yaitu sebagai berikut:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 123.

³⁷ M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 14, No. 2 (2017), h. 487.

keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah (2): 233).³⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi pekerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.³⁹

Ayat ini menjadi salah satu dasar hukum adanya sistem sewa menyewa dalam hukum Islam, seperti yang telah diterangkan dalam ayat ini bahwa setiap orang dapat menyewa orang lain guna menyusui anaknya, dan tentu saja ayat tersebut berlaku umum terhadap segala bentuk sewa menyewa.

b. Hadis

Selain ayat al-Qur'an di atas ada hadist yang menegaskan tentang upah, yaitu sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجة)

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 170.

³⁹ Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* (Semarang: Toha Putra, 2000), h. 350.

Artinya: Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW :

Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).⁴⁰

Hadist Rasulullah SAW yang lain juga menegaskan bahwa dalam transaksi ijarah, sebaiknya disebutkan secara jelas dan ditentukan secara jelas pula besar kecilnya upah yang akan diberikan kepada pekerja, yaitu sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجْرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ (رواه عبد الرزاق)

Artinya: Dari abu Sa'id Al khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda,

barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya. (HR. Abdur Rozzaq).⁴¹

Hadist lain Rasulullah Menyebutkan bahwa Allah swt memusuhi orang-orang yang berlaku tidak adil dengan perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti hadist berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَسْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرُوا رَجُلٌ بَاغَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَ رَجُلٌ اسْتَأْخِرًا فَاسْتَوْفَيْمَنَّهُ وَلَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه مسلم)

Artinya: Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW, Bersabda, tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: seseorang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku, kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikamati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan kuli,

⁴⁰ Romdoni Muslim, *300 Hadist Akhlak* (Jakarta: Restu Ilahi, 2004), h. 85.

⁴¹ *Ibid*

lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun iya tidak memenuhi upahnya. (HR. Muslim).⁴²

c. Ijma'

Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para Ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sebagai mana di ungkapkan Sayyid Sabiq: "Dan atas disyariatkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para Ulama ini", karena *Al-Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴³

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa "sesungguhnya sewa-menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha negri besar dan fuqaha masa pertama".⁴⁴ *Al-ijarah* merupakan "akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri."⁴⁵

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat

⁴² Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Khifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)* (Surabaya: Bina Iman, 2002), h. 695.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: PT. Alma'arif, 2001), h.18.

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid juz 2* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 2002), h.165

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117

mendatangkan manfaat, maka pekerja itu menjadi baik dan halal. Para Ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini. Sebagai mana diungkapkan Sayyid Sabiq: Dan atas disyari'atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak sanggup (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma'* para Ulama ini, karena *Al-Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴⁶

Al-ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi ini dapat meringankan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Konsep akad ini merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.⁴⁷

3. Rukun dan Syarat *Ujrah*/Upah

a. Rukun *Ujrah*

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun *ujrah* hanya satu yaitu *ijab dan qabul*, yaitu penjelasan dari kedua belah pihak yang menyewa dan menyewakan. Rukun dari *ujrah* sebagai suatu transaksi adalah akad

⁴⁶ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: Marja, 2018), h, 457.

⁴⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada sector keuangan Syariah)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 131.

atau perjanjian kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi ini telah berjalan secara suka sama suka.⁴⁸

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun. Menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu:⁴⁹

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan penyewa disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.

2) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatu al-aqad*) terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui, ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dengan diam-diam semata, syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam *ijarah* harus menyebut masa atau waktu yang ditentukan.

3) Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *musta'jir*

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 216.

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, h. 230.

4) Manfaat

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya, oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.⁵⁰

b. Syarat *Ujarah*

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:⁵¹

1) Pelaku *ijarah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, diisyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka *al-ijarah* tidak sah. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh

⁵⁰ *Ibid.* h. 231.

⁵¹ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186.

hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban. Segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.

2) Keridhaan pihak yang berakad

Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datang dari pihak-pihak lain. Ketentuan ini dapat dilihat dari firman Allah swt dalam surat an-Nisa ayat 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa (4): 29).⁵²

Ayat diatas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rejeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan antara kedua belah pihak. Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.

3) *Sighat* Ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* dalam sewa menyewa dan upah-mengupah.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., h. 360.

Ijab kabul dalam sewa-menyewa misalnya “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.5.000.000”, maka *musta’jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”.

Ijab Kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5.000.000”, kemudian *musta’jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

- 4) *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- 5) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, diisyaratkan pada yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa).
 - c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara’ bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d) Benda yang diisyaratkan kekal ‘*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
- 6) Akad (ijab kabul) dalam hal ini diisyaratkan:
 - a) Akad (ijab kabul) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan.

- b) Akad (ijab kabul) itu tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain.
- c) Akad (ijab kabul) harus terjadi atas kesepakatan bersama.⁵³

4. Macam-macam dan Waktu Pembayaran *Ujrah/Upah*

Dalam *fiqh muamalah* upah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.⁵⁴

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* di bagi menjadi dua:

- a. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jjir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajjir* mendapat imbalan tertentu dari *musta'jjir*, dan *musta'jjir* mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang bolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

⁵³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 142-143.

⁵⁴ M. I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 67.

b. *Ijarah* yang bersifat pekerja (*Ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara mempekerjakan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut Ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain, kemudian *musta'jjir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapat upah atas tenaga yang dikeluarkan untuk *musta'jjir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.⁵⁵

Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua yaitu:⁵⁶

- 1) *Ijarah* khusus, yaitu *ijarah* yang dilakukan seorang pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Contoh: A mempekerjakan B, selama B bekerja di tempat A dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka B tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain selama pekerjaan B tersebut belum selesai, dalam arti lain *ijarah* khusus ini mengikat seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

⁵⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, h. 236.

⁵⁶ *Ibid.* h. 237.

2) Ijarah *musytarik*, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan orang lain. Contohnya: A dan 6 orang saudaranya menerima pekerjaan dari B, untuk menggali sumur, maka selama A dan 6 saudaranya bekerja di tempat B ada orang lain menyuruh A untuk membenarkan TV nya yang rusak, maka A boleh menerima pekerjaannya tersebut.

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan yang menghhalalkan yang haram.⁵⁷

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hanafi, dalam pembayaran upah masyarakat boleh mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Jika dalam akad tidak terdapat mempercepat atau

⁵⁷ Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013), h. 374.

menangguhkan, sekiranya upah ini bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhinya pada masa berakhirnya masa tersebut.⁵⁸

Penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. Apalagi orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah dimintai jasanya. Menunda membayar upah dilarang oleh Rasulullah dan orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah bekerja kepadanya sangat dimurkai oleh Allah swt.⁵⁹

5. *Ujrah/Upah yang dilarang dalam Islam*

Islam tidak mengharamkan pengupahan dalam muamalat atau dalam perdagangan jasa kecuali dijelaskan Yusuf Qardhawi bahwa “Jasa dalam ruang lingkup perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang, upah yang melibatkan perdagangan khamr, ganja, babi, patung, barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi, atau pemanfaatannya diharamkan perdagangan juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan jasa yang didapatkan melalui praktek itu adalah haram dan kotor”.⁶⁰

Upah yang dilarang dalam Islam diantaranya dijelaskan Ahmad Soleh dalam bukunya *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, “jasa seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, membeli jasa tawaran harga yang sangat tinggi dan membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan

⁵⁸ Ibn Hajar Al-Asqalani,, h. 556.

⁵⁹ Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Ekonomi)* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 223.

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2000), h. 24.

sangat dibutuhkan oleh masyarakat”.⁶¹ Maksud dari sebagaimana dikemukakan di atas yaitu:

- a. Menawarkan jasa kepada seseorang yang masih menawar penjualan jasa orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- b. Membeli dengan tawaran harga jasa yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membeli jasanya.
- c. Membeli suatu jasa sewa harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya tinggi.

Diterangkan oleh Hasbi Ash Shiddieqy yaitu macam-macam upah yakni upah secara *‘arbun*, upah secara *najasy* menjual sesuatu yang haram adalah haram dan upah yang tidak transparan.⁶²

- a. Upah secara *‘arbun* yaitu membeli barang atau jasa dengan membayar sejumlah harga jasa lebih dahulu sebagai uang muka, kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan ke penjual.

⁶¹ Ahmad Sholeh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II* (Semarang: Usaha Keluarga, 2005), h. 37.

⁶² Asy-Syarbashi, *Yas ‘Alunaka (Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan)* (Jakarta: Lentera, 2000), h. 319.

- b. Upah secara *najasy* (Propaganda Palsu) yaitu menaikkan harga jasa bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).
- c. Menjual sesuatu yang haram misalnya upah jasa dari babi, *khamr*, makan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam penjualan dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya.
- d. Upah yang tidak transparan

Yaitu setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan upah yang tidak sesuai yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua upah yang masih ada unsur tidak transparan. Dan juga tujuan dari pekerjaan dari berniaga adalah memperoleh keuntungan. Selama agama membolehkan pekerjaan berniaga, namun demikian agama melarang keuntungan berlebihan yaitu keuntungan melebihi batas yang umum di masyarakat. Oleh sebab itu agama melarang seseorang pedagang memanfaatkan ketidaktahuan

pembeli akan harga dari suatu barang atau upah atas jasa yang dilakukan.⁶³

Termasuk unsur yang tidak tampak adalah upah yang ghaib. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa transaksi upah tersebut adalah termasuk upah yang ghaib (tidak ada) meskipun disifati dengan uang sebagai perantaranya. Ketidaktahuan yang disertai dengan ketiadaan sifat berpengaruh pada terjadinya upah dan sifat-sifat tersebut sebagai guna penyaksian (penglihatan dengan mata), karena keghaiban (ketidaktahuan) barang yang dijual, atau karena adanya kesulitan dalam membeberkan kekhawatiran akan terjadinya kerusakan padanya. Karena itu membolehkan penjualan yang didasarkan atas keterangan sifat-sifatnya.⁶⁴

6. Hak Menerima *Ujrah/Upah*

Hak ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsungnya dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya.⁶⁵ Secara umum dalam ketentuan al-Quran yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah dijumpai dalam firman Allah swt dalam surat An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi

⁶³ Ibid. h. 320.

⁶⁴ Ibid. h. 320.

⁶⁵ M. I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, h. 72.

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. an-Nahl (16): 90).⁶⁶

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja maka dikemukakan bahwa Allah swt memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk menjadi adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerja disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan pemberi pekerja. Maka wajib pemberi pekerja untuk mensejahterakan pekerjanya, termasuk dalam hal ini member upah yang layak.

7. Sistem Pembayaran *Ujrah*/Upah Dalam Islam

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka keajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Upah berhak diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁶⁷

- a. Pekerjaan telah selesai, jika akadnya atas jasa maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- b. Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang, apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Mempercepat pembayaran *ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai hal penangguhan pembayaran.

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 479.

⁶⁷ *Ibid.* h. 71.

Ketentuan upah-mengupah ialah harus berbeda dengan objek pekerjaannya, menyewa rumah dengan bayaran rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa, merupakan *ijarah* yang tidak memenuhi syarat. Karena hukumnya tidak sah dan mengantarkan kepada riba. Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara benar sesuai dengan manfaat yang diterimanya, menurut Syafi'i dan Ahmad sesungguhnya Ia berhak dengan akad itu sendiri. Dan dijelaskan bahwa penentuan upah itu harus ditentukan terlebih dahulu sebelum *ijarah* dilaksanakan.⁶⁸

Mengenai sifat harga persewaan hal ini berkaitan dengan para jumhur fuqaha diantaranya ialah Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i, pada garis besarnya sependapat bahwa diantara syarat-syarat persewaan (perburuhan) hendaknya diketahui harga dan manfaatnya. Dan hal itu bisa dengan mempertimbangkan tujuannya, seperti dalam hal menjahitkan atau dengan menetapkan masanya apabila tidak ada tujuan yang tertentu, seperti memperkerjakan buruh.⁶⁹

Jumhur fuqaha mengemukakan alasan, bahwa perburuhan itu pada dasarnya juga merupakan jual beli. Dengan demikian apa yang menghalangi jual beli karena adanya unsur ketidaktahuan terhadap tempat yang menimbulkan kerugian juga berlaku pada masalah perburuhan, Imam Malik dan syafi'i sependapat bahwa jika kedua belah pihak menetapkan masa tertentu bagi manfaat yang tidak ada tujuannya, juga menetapkan permulaan

⁶⁸ Chairumanan Pasaribu & Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 157.

⁶⁹ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid* (Semarang: Asy-Syifa' 2000), h. 211.

masa tersebut dan permulaan ini dimulai sesudahkan akad maka cara ini diperbolehkan.⁷⁰

Tetapi kedua imam ini berselisih pendapat dalam hal apabila kedua belah pihak tidak menetapkan permulaan masa tersebut atau menetapkannya tetapi bukan sesudah akad maka Imam Malik berpendapat bahwa cara seperti itu dibolehkan, yakni jika keduanya menetapkan masanya, tetapi tidak menetapkan permulaan masa tersebut, seperti jika seseorang berkata “Saya menyewa rumah ini dari kamu selama setahun dengan harga sekian, atau sebulan dengan harga sekian”. Tanpa menyebutkan permulaan bulan atau tahun tersebut maka Imam Syafi’i berpendapat bahwa cara seperti ini tidak dibolehkan.⁷¹

Begitu juga penetapan sewa pada masa pemerintahan khalifah Umar ia senantiasa mengingatkan para pejabatnya untuk berlaku jujur dan adil dalam penetapan sewa atas tanah. Ketika beliau mengutus pejabat pemerintahannya, Hudaifah bin Yaman dan Usman bin Hanif ke Negara yang ditaklukan Islam yaitu Iraq dan Syiria untuk menetapkan sewa atas tanah beliau berpesan kepada keduanya yaitu “Kalian harus mempertimbangkan dengan hati-hati manakala kalian menetapkan (atau memungut sewa), jangakah mengambil lebih dari apa yang dihasilkan oleh tanah-tanah tersebut.”⁷²

Selain itu Imam Abu Yusuf menguraikan tentang prinsip penetapan sewa yang dijalankan oleh khalifah Umar, yaitu “Kita tidak sewajarnya

⁷⁰ *Ibid.* h. 212.

⁷¹ *Ibid.* h. 212.

⁷² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 180.

mengenakan sewa terhadap petani-petani diluar kemampuan mereka untuk membayar dan tidak seharusnya membebankan mereka melebihi dari apa yang dapat dihasilkan oleh tanah tersebut”. Dalam peristiwa lain, Imam Abu Yusuf merujuk pada perintah khalifah Umar kepada pejabat negaranya, menyatakan “Dan kamu seharusnya menetapkan dan memungut sewa dari para petani penggarap dengan cara yang baik, ringan dan disepakati oleh mereka”. Oleh sebab itu dalam menetapkan harga atau pemungutan sewa hendaknya mempertimbangkan asas keadilan dan kejujuran dan saling memikirkan tindakan yang sepantasnya dilakukan agar terjauhi dari hal yang tidak diinginkan berupa upah yang menjadi haram hukumnya dikarenakan unsur keterpaksaan dari salah satu pihak.⁷³

C. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, penulis belum menemukan judul yang sama. Namun melalui penelusuran yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penulisan karya ilmiah, penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan ini, antara lain:

1. Gilang Fhitryan Widsya Pratama dari Universitas Sumatera Utara Medan, Program Studi Strata 1 Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, dengan judul skripsi “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa Taksi Berbasis Online (*Grabcar*) Pada Mahasiswa Universitas

⁷³ *Ibid.* h. 181.

Sumatera Utara”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan Uji F variabel bebas (Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan, Perhatian, dan Bukti Fisik) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Kepuasan Mahasiswa Sebagai Pelanggan). Berdasarkan hasil Uji-t disimpulkan bahwa yang mendominasi dalam mempengaruhi Kepuasan Mahasiswa sebagai Pelanggan adalah Kehandalan. Hasil pengujian secara parsial (Uji-t) menunjukkan bahwa variable Bukti Fisik berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap Kepuasan Mahasiswa sebagai Pelanggan di Universitas Sumatera Utara.⁷⁴

2. Zulfahmi, dari Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Departemen Manajemen dengan judul skripsi “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Pelanggan Jasa Transportasi Online Grab Di Universitas Hasanuddin”. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan kepercayaan secara individu atau tersendiri terhadap loyalitas pelanggan jasa transportasi online Grab di Universitas Hasanuddin. Terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan kepercayaan secara bersama-sama atau keseluruhan terhadap loyalitas pelanggan jasa transportasi online Grab di Universitas Hasanuddin. Kepercayaan merupakan variabel yang paling dominan

⁷⁴ Gilang Fhitryan Widsya Pratama, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa Taksi Berbasis Online (Grabcar) Pada Mahasiswa Universitas Sumatera Utara* (Skripsi Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017), h. 83.

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan jasa transportasi online Grab di Universitas Hasanuddin.⁷⁵

Maka dengan demikian dari dua skripsi tersebut belum ada yang membahas tentang *GrabCar* seperti yang saya teliti ini, dimana Gilang Fhitryan Widsya Pratama membahas tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan jasa taksi berbasis online (*Grabcar*) pada mahasiswa Universitas Sumatera Utara, dan Zulfahmi membahas tentang pengaruh kualitas pelayanan dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan jasa transportasi online grab di Universitas Hasanuddin, adapun yang penulis lakukan yaitu membahas tentang kedudukan akun fiktif *driver GrabCar* Bandar Lampung, serta tinjauan hukum Islam atas kedudukan akun fiktif *driver GrabCar* Bandar Lampung.

⁷⁵ Zulfahmi, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Pelanggan Jasa Transportasi Online Grab Di Universitas Hasanuddin* (Skripsi Fakultas Ushuludin, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018), h. 97

DAFTAR PUSTAKA

- A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Badar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- A. Mas'adi Ghufuran, *Fiqh Muamalah Kontekstual* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Islam* Jakarta: Gramedia, 2010.
- Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* Jakarta: Gramedia, 2013.
- Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* Semarang: Toha Putra, 2000.
- Ahmad Sholeh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II* Semarang: Usaha Keluarga, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* Jakarta: Kencana, 2010.
- Asy-Syarbashi, Yas 'Alunaka (Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan) Jakarta: Lentera, 2000.
- Chairumanan Pasaribu & Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta: PT Gramedia, 2011.
- Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- H. A. Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis* Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasby Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

- Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* Bandung: Marja, 2018.
- Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid* Semarang: Asy-Syifa' 2000.
- Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Ekonomi)* Jakarta: Kencana, 2015.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Khifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)* Surabaya: Bina Iman, 2002.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Bandung: Mandar Maju, 2006.
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 14, No. 2 (2017).
- M. I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Nasrun Harun *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2007.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* Jakarta: Logos Publishing House, 2003.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* Jakarta: Modern English Press, 2001.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Romdoni Muslim, *300 Hadist Akhlak* Jakarta: Restu Ilahi, 2004.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sector Keuangan Syariah)* Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sugiono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung, Alfabeta, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suratan Pendekatan* Jakarta, Rineka Cipta, 2006.
- Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* Bandar Lampung: LP2M, 2015

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tim Tasbih Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Yogyakarta: Versia Yogya Grafika, 2001.

Wikipedia, "Grab (aplikasi)", (On-Line) tersedia di: [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab_\(aplikasi\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab_(aplikasi)). (10 Mei 2020).

Wikipedia, "Pengertian Akun Fiktif", (On-Line) tersedia di: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengertian_Akun_Fiktif. (10 Mei 2020).

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000.